

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang terdiri atas objek cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat maupun di perairan. Warisan ini harus dilestarikan karena memiliki nilai signifikan bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan resmi.

Menurut buku, “*Archaeology Theories, Methods, and Practice*” oleh Colin Renfrew dan Paul Bahn (2016):

Archaeologist have a duty to report what they find. Since excavation is, to a certain extent, destructive, published material is often the only record of what was found at a site... The internet and the popular media can help to fulfill one of archaeology's fundamental purposes: to provide the public with a better understanding of the past.

Dari kutipan tersebut, dijelaskan bahwa seorang peneliti arkeologi memiliki tugas melaporkan temuan mereka di lapangan kepada masyarakat dan internet dapat menjadi salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut (Renfrew & Bahn, 2016).

Undang-undang No. 11 tahun 2010, pasal 79, mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian wajib menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Dengan berkembangnya

media digital, data arkeologi kini dapat dikelola lebih efektif, praktis, dan efisien, salah satunya melalui sistem informasi *database*.

Seperti yang dikatakan oleh Fowler dan Givens dalam *The Records of Archaeology* (1995):

The Society for American Archaeology's Committee on the History of Archaeology (COHA)... had the following charge... (3) to develop a computerized database to facilitate continual cataloguing of material relating to the history of archaeology...a further goal of this committee should be to increase awareness on the part of all archaeologist (professional and avocational) of their ethical responsibilities to ensure that documentary records as well as artifacts and ecofacts are preserved in usable form

Prosedur pendaftaran data ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Pasal 28, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 16, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sebuah basis data daring untuk kebudayaan yang disebut Data Pokok Kebudayaan (Direktur Pelindungan Kebudayaan, 2022). Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) adalah bagian dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai data kebudayaan dari berbagai sumber.

Sistem ini secara luas mengumpulkan data mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat. Data ini mencakup Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Tenaga Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Sarana dan Prasarana, serta Objek

yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan/atau yang telah diakui sebagai Cagar Budaya (CB) (Kementerian Pendidikan, 2024).

Data pokok kebudayaan adalah sistem lanjutan dari sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Hal ini disebabkan karena struktur data pada sistem sebelumnya (Registrasi Nasional) belum memiliki data yang lengkap dengan substansi yang valid. Akibatnya terjadi migrasi data untuk pemenuhan struktur dan analisis data kedalam sistem DAPOBUD (Direktur Pelindungan Kebudayaan, 2022). Per-bulan Februari 2021, sistem Registrasi Nasional (REGNAS) resmi dihentikan karena proses migrasi data, sehingga dibuatlah formulir pencatatan yang dilakukan secara manual melalui elektronik (Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, 2023).

Data dari DAPOBUD digunakan untuk menghitung dan menganalisis Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). IPK adalah alat ukur kinerja pembangunan kebudayaan, yang terdiri dari tujuh dimensi: (1) ekonomi budaya; (2) pendidikan; (3) ketahanan sosial budaya; (4) warisan budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; dan (7) kesetaraan gender. Untuk menilai persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya, dimensi Warisan Budaya mencakup indikator nilai persentase dari benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan dibandingkan dengan total registrasi (X4.1). Dimensi ini mencerminkan upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam memajukan produk budaya, termasuk warisan budaya benda dan takbenda (K. R. dan T. Kementerian Pendidikan, t.t.-d).

Pada tahun 2018, Provinsi Jambi memiliki Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai berikut: Dimensi Warisan Budaya sebesar 45,53, nilai ini lebih tinggi dari nilai nasional Indonesia yaitu, 41,11. Persentase dari benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang terdaftar di Jambi mencapai sekitar 1,59%. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 3,17% dan juga jauh dari target yang ditetapkan sebesar 50%.

Pada tahun 2019, Provinsi Jambi memiliki Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Dimensi Warisan Budaya sebesar 47,94, nilai ini lebih tinggi dari nilai nasional Indonesia yaitu, 43,89. Persentase dari benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan di Jambi mencapai sekitar 1,30% dari total registrasi. Persentase ini masih jauh di bawah angka nasional sebesar 2,83% dan target 50% yang ditetapkan dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan 2020.

Pada tahun 2020, Provinsi Jambi memiliki Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Dimensi Warisan Budaya sebesar 44,19, nilai ini lebih tinggi dari nilai nasional Indonesia yaitu, 41,00. Persentase objek, bangunan, struktur, dan situs warisan budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Jambi adalah sekitar 1,30%. Angka ini masih jauh di bawah persentase nasional sebesar 3,31% dan target yang ditetapkan sebesar 50% (Indeks Pembangunan Kebudayaan 2020).

Pada tahun 2021, Provinsi Jambi memiliki Nilai (IPK) Dimensi Warisan Budaya sebesar 49,35, nilai ini lebih tinggi dari nilai nasional Indonesia yaitu, 46,63. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap keseluruhan registrasi di Jambi berkisar sekitar 1,30%. Angka ini masih

jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 3,90% dan target yang ditetapkan sebesar 50% menurut Indeks Pembangunan Kebudayaan 2021.

Pada tahun 2022, pada buku “Kebudayaan dalam Perbandingan: Analisis Komparatif atas IPK dan Enam Indeks Terkait” tidak melibatkan Dimensi Warisan Budaya dikarenakan belum ada alat ukur berupa indeks atau indikator yang dapat dijadikan perbandingan dalam mengukur aspek warisan budaya, namun pencapaian IPK tahun 2022 tetap ada, yakni dimensi warisan budaya nasionalnya sebesar, 48,92 (K. R. dan T. Kementerian Pendidikan, t.t.-e).

Pada tahun 2023, Provinsi Jambi memiliki nilai 53,53 untuk dimensi Warisan Budaya. Nilai ini hampir mendekati angka nasional, yaitu 51,54. Namun, buku 'Enam Tahun Pembangunan Kebudayaan: Perkembangan IPK Nasional dan Provinsi 2018-2023' tidak menjelaskan indikator Nilai Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (K. R. dan T. Kementerian Pendidikan, t.t.-c).

Tabel 1. 1 Kriteria Capaian IPK**Kriteria Capaian IPK**

Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
≤ 20	$20 < x \leq 40$	$40 < x \leq 60$	$60 < x \leq 80$	$80 < x \leq 100$

(Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018)

Tabel 1. 2 Nilai Dimensi Warisan Budaya Provinsi Jambi

Tahun	Dimensi Warisan Budaya Jambi	Indonesia	X4.1 (Jambi)	Kategori
2018	45,53	41,11	1,59%	Sedang
2019	47,94	43,89	1,30%	Sedang
2020	44,19	41,00	1,30%	Sedang
2021	49,35	46,63	1,30%	Sedang
2022	51,91	48,92	-	Sedang
2023	53,53	51,54	-	Sedang

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2023, secara kuantitas nilai IPK berada pada kategori sedang, serta belum ada peningkatan sejak laporan di tahun 2018.

Pada tahun 2023, untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi di sistem Data Pokok Kebudayaan akibat migrasi data dari sistem Registrasi Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan kegiatan Percepatan Pendataan Cagar Budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, dan Koleksi Museum. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dan tenaga ahli kebudayaan dalam program Magang

Bersertifikat Kebudayaan (MBK) dan berlangsung di 23 wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Museum Nasional di Jakarta (Direktorat Pelindungan Kebudayaan, 2023). Meskipun kegiatan tersebut telah dilakukan, hingga tahun 2025, informasi data yang telah dimasukkan ke dalam sistem, khususnya di Provinsi Jambi, masih banyak yang kosong, tidak lengkap, dan kurang informatif (K. R. dan T. Kementerian Pendidikan, t.t.-a).

Penelitian ini penting dilakukan, sebab dapat menjadi bahan pertimbangan kepada para pemangku kepentingan di sistem Data Pokok Kebudayaan untuk meningkatkan pemahaman pelaksana sistem dan implementasi, khususnya di wilayah Provinsi Jambi agar berjalan lebih optimal. Kemudian, penelitian ini ikut berkontribusi sebagai penyedia referensi akademik dan menambah literatur dalam melakukan penelitian dalam bidang Arkeologi. Selanjutnya, penelitian ini juga mampu menjelaskan kesesuaian antara data yang telah terinput dengan pemahaman serta implementasi pelaksana terhadap sistem secara kuantitatif, sehingga memberikan gambaran yang akurat dan terukur. Hal ini dapat menjadi landasan dalam melakukan evaluasi dan saran pengembangan sistem Data Pokok Kebudayaan untuk ke depannya.

Untuk mencapai hal ini, penulis mengambil objek orang yang melaksanakan (*user*) atau yang memiliki *role* dalam melakukan input data ke dalam Sistem Data Pokok Kebudayaan, meliputi penginput data, verifikasi dan validasi, dan penetapan sebagai responden dalam mengisi kuesioner yang merupakan alat untuk melakukan evaluasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah proses penilaian yang bertujuan untuk menentukan nilai layanan, informasi, atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna. Evaluasi melibatkan pengumpulan dan pengamatan berbagai bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu objek, program, atau proses yang berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penulis dalam penelitian ini memilih jenis penelitian evaluasi formatif, karena menilai pelaksanaan sistem Data Pokok Kebudayaan yang masih berjalan serta menggunakan model evaluasi berupa evaluasi proses. Evaluasi proses disini terkait dengan kegiatan pelaksanaan sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi. Menggunakan model *Human Organization and Net Benefit* (HOT-Fit) dalam penyusunan instrumen penelitian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Perbedaan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada periode 2018-2023 yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, menimbulkan sejumlah pertanyaan masalah berikut:

1. Bagaimana tingkatan pemahaman pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan pada substansi cagar budaya di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana tingkatan implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan pada substansi cagar budaya di Provinsi Jambi?

1.3 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup wilayah dan subjek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi serta di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Kajian ini membutuhkan data dari responden yang memiliki kriteria: mempunyai akun DAPOBUD yang dibuktikan dengan SK, dan/atau pernah mengikuti Bimtek DAPOBUD tentang percepatan pendataan pada tahun 2023. Dari kriteria ini, telah terkumpul sebanyak 30 responden di Provinsi Jambi. Perlu diketahui, bahwa jumlah tim DAPOBUD di masing-masing kabupaten berbeda-beda sesuai dengan kondisi kabupatennya.

2. Ruang lingkup kajian penelitian

Penulis melakukan kajian tentang implementasi sistem DAPOBUD. Dikarenakan sistem DAPOBUD merupakan sistem integrasi data kebudayaan yang meliputi Objek Pemajuan kebudayaan (OPK), Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya (CB), Tenaga Kebudayaan (TB), Lembaga Kebudayaan (LK), dan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (SP), penelitian ini fokus pada penggunaan DAPOBUD di bagian substansi Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya.

3. Ruang lingkup waktu penelitian

Ruang lingkup penelitian dimulai sejak peluncuran sistem pada tahun 2022, dan evaluasi dilakukan pada tahun 2024 melalui penyebaran kuesioner. Data pendukung yang digunakan mencakup rentang waktu tahun 2022-2024.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tingkat implementasi sistem DAPOBUD sebagai wadah pencatatan, pengumpulan informasi, registrasi, dan penetapan cagar budaya di Provinsi Jambi, telah berjalan baik atau tidak dari tahun 2022-2024 secara kuantitatif.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi berupa deskripsi tentang sistem database yang menggabungkan data dari penelitian arkeologi. Sistem database yang dimaksud ialah Sistem Data Pokok Kebudayaan, pada substansi cagar budayanya. Mampu untuk menjelaskan kesesuaian antara hasil yang diperoleh dari data Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2018-2023 dan data yang terinput pada sistem DAPOBUD di tahun 2018-2024 terhadap, pemahaman dari pelaksana dan implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menyediakan informasi, acuan, serta referensi di berbagai bidang ilmu, terutama dalam bidang Arkeologi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan terkait peningkatan pemahaman dan implementasi sistem khususnya di Provinsi Jambi.

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Saat ini, belum ada studi yang secara khusus meneliti penerapan sistem Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) di Provinsi Jambi maupun penelitian yang secara keseluruhan membahas sistem DAPOBUD.

1.6.2 Penelitian Relevan

Elfita Afryanda dan Idria Maita (2022) dalam artikelnya yang berjudul “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik (Simak) Menggunakan Metode Hot-Fit” bertujuan untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen studi (SIMAK) online di Universitas Islam Indragiri (UNISI).

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan model Hot-Fit guna mengukur dan mengidentifikasi masalah pada SIMAK. Untuk menentukan faktor keberhasilan atau kegagalan sebuah sistem informasi, penelitian ini melakukan evaluasi menyeluruh. Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi akurat yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa penilaian sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan atau perkembangan suatu objek yang dinilai.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui survei dengan kuesioner dan wawancara yang melibatkan mahasiswa serta staf IT pengguna aplikasi SIMAK. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen akademik (SIMAK) di UNISI masih belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam penerapannya, sehingga secara keseluruhan sistem tersebut belum berfungsi sesuai dengan harapan (Maita & Afriyanda, 2022) .

Kasman Rasid, Salkin Lutfi, dan Saiful Do. Abdullah (2022) menulis artikel berjudul "Penerapan Metode Human Organization Technology and Benefit (HOT

Fit)". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan layanan Sistem Informasi Akademik (SIMAK) versi 2 di Universitas Khairun Ternate.

Metode yang digunakan ialah kuantitatif model HOT Fit (Human Organization Technology and Benefit) dalam menerapkan evaluasi keberhasilan pada layanan SIMAK versi 2. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, kuesioner, dan studi Pustaka. Dalam mengukur fenomenanya dijabarkan menjadi indikator variabel menggunakan Skala Likert yang menjadi titik tumpu penyusunan instrumen penelitian. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini ialah evaluasi tingkat keberhasilan layanan pada sistem informasi akademik versi 2 dalam kategori kurang baik (Rasid dkk., 2022).

Dalam artikel yang ditulis oleh Tiara Elsi Febrianti, Desi Andreswari, dan Julia Purnama Sari pada tahun 2022 yang berjudul "Pengukuran Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja menggunakan Generalized Structured Component (GESCA) dalam Human Organization Technology (HOT) Fit Model", penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah sistem error yang diakibatkan oleh penggunaan server secara bersamaan oleh pengguna. Penelitian ini mengamati tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi e-kinerja serta menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan sistem tersebut.

Metode yang diterapkan adalah metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan Generalize Structured Component Analysis (GeSCA) dan dibantu oleh aplikasi SPSS untuk perhitungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status sistem informasi e-kinerja telah berhasil

diimplementasikan, dilihat dari keberhasilan aspek teknologi dari sistem tersebut. (Febrianti dkk., 2022).

Muhammad Damas Fatih (2017) menulis artikel berjudul “Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Online Berbasis Web pada Universitas Jambi (dari Perspektif Mahasiswa sebagai Pengguna)” yang bertujuan untuk memahami bagaimana variabel kualitas sistem, kualitas layanan, dan kualitas informasi mempengaruhi kepuasan pengguna dalam penggunaan SIKAD online berbasis web.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model penelitian Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden atau sampel penelitian. Kepuasan pengguna diukur menggunakan Skala Likert dengan nilai dari 1 yang berarti 'sangat tidak setuju' hingga 5 yang berarti 'sangat setuju'.

Berdasarkan persepsi mahasiswa sebagai pengguna, kualitas informasi yang diperoleh sudah baik. Namun, tingkat kualitas sistem, layanan, dan kepuasan pengguna dinilai cukup.

Dari penjelasan mengenai penelitian relevan di atas, dapat dilihat kesamaan terhadap penelitian ini, diantaranya pada metode yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan metode kuantitatif menggunakan model HOT-Fit dan bertujuan untuk mengukur implementasi dari suatu sistem.

Kemudian, selain kesamaan, terdapat perbedaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu, pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan subjek penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Jambi dengan objek penelitian yaitu sistem Data Pokok Kebudayaan. Lalu subjek penelitian yakni responden yang memiliki kriteria sebagai Tim DAPOBUD dan/atau yang pernah mengikuti BIMTEK percepatan pendataan sistem DAPOBUD di tahun 2023.

1.6.2 Kerangka Teori

Dalam buku, “*Field Methods in Archaeology*” (2016), Harry J. Shafer menjelaskan tentang 3 tujuan dari *Cultural Resource Management* (CRM), yaitu:

(1) managing the archaeological record by establishing and monitoring cultural inventories, (2) assessing site significance by determining the research potential and cultural value of each site and determining which sites should be saved or excavated through salvage archaeology and which ones will be sacrificed to impending construction projects, and (3) protecting and preserving cultural resources.

Dari kutipan tersebut menggambarkan bahwa CRM mengelola sumber daya arkeologi, menentukan situs yang perlu diselamatkan atau dikonstruksi untuk masa depan, serta melindungi dan melestarikannya. sumber daya budaya (Hester dkk., 2016).

Selaras dengan pernyataan di atas, McGimsey dan Davis (1979) dalam bukunya yang berjudul “*The Management of Archaeological Resources*” menyatakan, bahwa sumber daya arkeologi tidak dapat diperbaharui membutuhkan cara untuk melestarikan dan mengelolanya agar sumber daya yang terbatas itu dapat terjamin pemanfaatannya selama mungkin.

Daud Aris Tanudirjo (2004) melalui Penataran Tenaga Teknis Pelestarian Benda Cagar Budaya, Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman

menyampaikan pemikirannya yang berjudul, “Manajemen Sumberdaya Budaya Kepurbakalaan” menyatakan jika, salah satu tugas yang harus dilaksanakan dari para pengelola warisan budaya (istilah yang merujuk pada tinggalan arkeologis) adalah membantu masyarakat menjadi fasilitator dalam proses pemanfaatan sumberdaya budaya, seperti upaya untuk mengumpulkan, mendaftarkan, meneliti, serta melestarikan dan memanfaatkannya (Tanudirjo, 2004).

Don D. Fowler dan Douglas R. Givens (1995) dalam “*The Records of Archaeology*”, menjelaskan bahwa sistem informasi database dapat berfungsi sebagai pangkalan data berbasis daring, dimana sumber data arkeologis akan disimpan dan dapat diakses oleh siapapun hingga kapanpun dan tetap menyadari bahwasanya situs dan data arkeologi yang telah dikumpulkan tersebut dapat hilang hingga musnah oleh kelalaian (Fowler & Givens, 1995)

Dalam kegiatan penelitian, landasan teori dimanfaatkan untuk mempertegas, perjelas, serta mempertajamkan ruang lingkup variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2023a). Teori yang digunakan berasal dari Colin Renfrew dan Paul Bahn dalam bukunya “*Archaeology Theories, Methods, and Practise*” (2016, hlm. 3:584) yang menjelaskan jika seorang peneliti arkeologi harus melaporkan temuan mereka dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik tentang apa yang ditemukan di lapangan. Internet serta media *online* lainnya dapat membantu mencapai tujuan ini.

Hal ini juga didukung oleh pasal 79 Undang-Undang No. 11 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara penelitian

harus menyebarluaskan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat umum.

Ryan Espersen, dalam buku *Managing Our Past Into the Future* (2015, hlm. 5:103), menyatakan:

“The field of archaeology, and by extension the Cultural Resource Management (CRM) industry, is dependent upon public interest to justify their existence. For CRM in particular, this involves maintaining good working relations upon multiple levels involving governments, businesses, academia, and the general public. In order to effectively operate, CRM firms must understand the social contexts in which CRM is taking place, how the results of their fieldwork will be interpreted in the present by the stakeholder groups involved, and in the future after the results enter the public domain.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam bidang CRM perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai konteks sosial tempat mereka bekerja. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat memastikan bahwa hasil kerja mereka dapat diinterpretasikan dengan benar oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan dan di masa depan setelah hasil tersebut dapat menjadi informasi publik (Hofman & Havisser, 2015).

1.7 KERANGKA BERPIKIR

Sistem adalah struktur yang terorganisir, membentuk satu kesatuan, dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu (Purnawati dkk., 2024). Sistem Data Pokok Kebudayaan merupakan suatu sistem informasi, dimana sistem ini mampu untuk mengoleksi, memasukkan data, menyimpan data, mengolah data, serta menyediakan informasi terkait kebudayaan. Dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi di berbagai Bidang)”, (2024,

hlm. 18), sistem informasi dijelaskan sebagai serangkaian sub-sistem yang saling terhubung dan terstruktur. Sistem ini terdiri dari kombinasi pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data, yang berfungsi untuk menambah, menyimpan, mengolah, memperbarui, dan mendistribusikan informasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi (Purnawati dkk., 2024).

Dalam mengoperasikan sistem DAPOBUD, terdapat user pendataan yang mampu melakukan penginputan data pokok kebudayaan dan melakukan sinkronisasi data yang berada di pusat dengan data yang berada di kabupaten/kota. 'user' menurut *Oxford Learner's Dictionaries*, "a person or thing that uses something" atau dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian dari 'user' dapat dikatakan sebagai 'pengguna' karena berarti orang yang menggunakan.

Menurut buku yang berjudul *Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi di berbagai Bidang)*, Pengguna sebagai sumber daya manusia adalah orang yang terdiri dari sekelompok pihak atau pengguna individu yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan *output* dari sistem informasi. (Purnawati dkk., 2024).

Menurut buku "*Managing Archaeological Collections in Middle Eastern Countries*", oleh Fitzpatrick, (2016, hlm. 34), menyatakan jika sumber daya manusia sebagai pengguna harus memiliki kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman untuk memastikan jika rencana dalam mengelola koleksi arkeologi dapat terpenuhi (Fitzpatrick, 2016).

Menurut Kamus Oxford, implementasi adalah tindakan yang membuat sesuatu yang telah diputuskan secara resmi mulai diterapkan atau digunakan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi sistem dapat meningkatkan akurasi data, memastikan proyek diselesaikan dalam waktu yang tepat dan selaras dengan standar yang ditentukan. Beberapa aspek yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi sistem, yaitu keterlibatan *stakeholder*, komunikasi efektif, pelatihan pengguna, dan pendekatan bertahap untuk menyesuaikan dan memperbaiki sistem berdasarkan *feedback* yang ada. Kesuksesan implementasi sistem informasi pun dapat dipengaruhi oleh dari aspek sumber daya manusia (pengguna) karena terlibat langsung dalam penggunaan dan pengolahan sistem informasi tersebut (Astrini & Aril Ahri, 2019; Purnawati dkk., 2024).

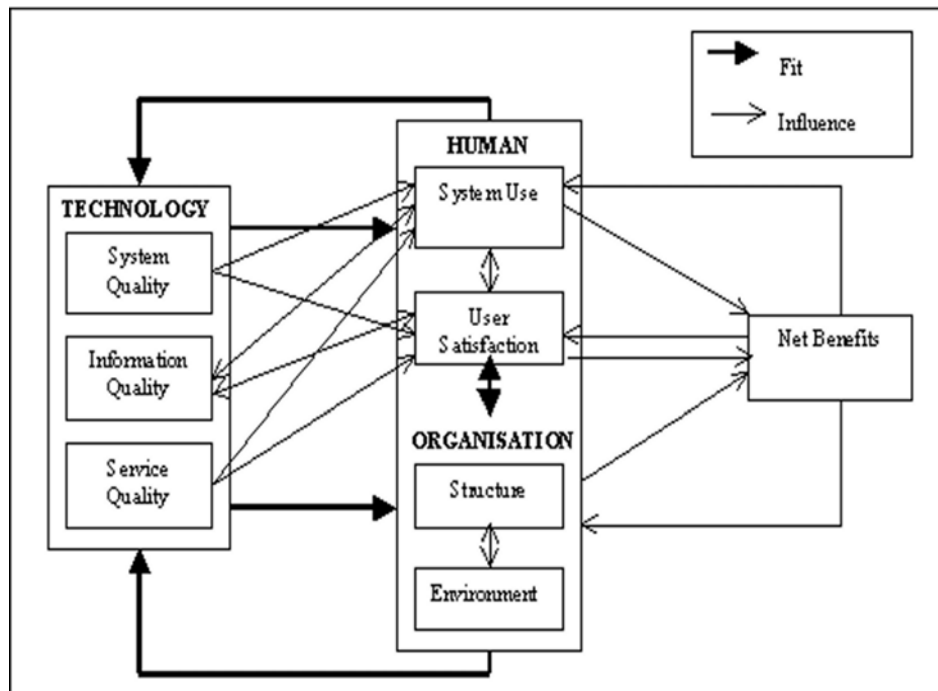
Dalam penyusunan instrumen penelitian, penulis menggunakan model HOT-Fit (*Human, Organization, and Technology, Net Benefit*), untuk mengevaluasi dari segi faktor manusia, organisasi, teknologi hingga hubungannya dengan manfaat dari sistem informasi. HOT-Fit merupakan teori yang dikembangkan oleh Yusof dkk. (2006) untuk mengevaluasi tentang sistem kesehatan.

Teori HOT-Fit digunakan dalam menyusun kisi-kisi instrumen untuk sub-variabel pemahaman pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan (X1), sub-variabel implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan (X2), dan variabel manfaat yang dirasakan oleh pelaksana Sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi (Y). Teori ini menjelaskan bahwa kesesuaian antara faktor manusia, organisasi, dan

teknologi menjadi faktor penting untuk mencapai manfaat dari sistem Data Pokok Kebudayaan

Untuk membantu dalam penilaian, penulis menyusun pertanyaan/ Pernyataan variabel pemahaman pengguna dan implementasi sistem, berdasarkan indikator manusia, organisasi, dan teknologi. Indikator manfaat dijadikan sebagai variabel tersendiri.

Pada Gambar 1.1 menampilkan bagan yang dikembangkan oleh Yusof et.al untuk model *Human, Organization, Technology, dan Net Benefit* (HOT-FIT). Dari bagan ini terlihat bahwa indikator teknologi berhubungan dengan indikator manusia dan organisasi, begitu juga sebaliknya, indikator manusia dan organisasi berhubungan dengan teknologi. Selain itu, net benefit (manfaat) juga memiliki hubungan timbal balik dengan ketiga indikator tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikator manusia, organisasi, dan teknologi memiliki hubungan dengan manfaat.



Gambar 1. 1 Model HOT-Fit

(Sumber: Yusof dkk., 2006)

Data entitas per-provinsi dalam rekapitulasi sistem Data Pokok Kebudayaan memberikan total penginputan untuk 5 kategori kebudayaan di 34 provinsi. Pada kategori ODCB tahun 2018, Provinsi Jambi telah menginput 586 data. Jumlah ini lebih kecil dari 8 provinsi dan lebih besar dari 25 provinsi yang tercatat di sistem. Pada tahun 2019, Jambi menginput 153 ODCB, yang lebih kecil dari 4 provinsi dan lebih besar dari 29 provinsi lainnya..

Pada tahun 2020, tidak ada data yang terinput (0), jumlah ini lebih kecil dari 12 provinsi dan sama dengan 21 provinsi lainnya. Pada tahun 2021 di Provinsi Jambi, tidak ada data ODCB yang terinput (0), sama dengan 28 provinsi lainnya, sedangkan 5 provinsi memiliki data yang terinput. Pada tahun 2022 juga tidak ada

data yang tercatat pada kategori ODCB, berbeda dengan 2 provinsi yang telah menginput data, sementara 31 provinsi lainnya memiliki keadaan yang sama dengan Provinsi Jambi.

Pada tahun 2023, Provinsi Jambi mencatat 38 data ODCB, jumlah ini lebih sedikit dari 3 provinsi tetapi lebih banyak atau sama dengan 30 provinsi lainnya. Pada tahun 2024, tercatat hanya 1 kasus ODCB, lebih sedikit dari 28 provinsi namun lebih banyak atau sama dengan 5 provinsi lainnya..

Tabel 1. 3 Data Terinput pada sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi

Tahun	Provinsi Jambi	Provinsi lainnya
2018	586	• < 8 provinsi • > 25 provinsi
2019	153	• < 4 provinsi • > 29 provinsi
2020	0	• < 12 provinsi • $\geq$ 21 provinsi
2021	0	• < 5 provinsi • $\geq$ 28 provinsi
2022	0	• < 2 provinsi • $\geq$ 31 provinsi
2023	38	• < 3 provinsi • $\geq$ 30 provinsi
2024	1	• < 28 provinsi • $\geq$ 5 provinsi

(Sumber: Website Data Pokok Kebudayaan. Kementerian Pendidikan.)

The screenshot shows the 'Rekapitulasi' page for the year 2018. The table displays data for various provinces, with the row for JAMBI highlighted in red. The data for JAMBI is as follows:

Provinsi	OPK	ODCB	SDM Kebudayaan	Lembaga Kebudayaan	Sarana & Prasarana	Jumlah Total
ACEH	272	597	0	0	0	869
BALI	601	1.115	0	0	0	1.716
BANTEN	26	754	0	0	0	780
BENGKULU	114	925	0	0	0	1.039
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	179	965	0	0	0	1.144
DKI JAKARTA	216	311	0	0	0	527
GORONTALO	182	2	0	0	0	184
JAMBI	250	586	0	0	0	836
JAWA BARAT	167	963	0	0	0	1.130
JAWA TENGAH	217	5.778	0	0	0	5.995

Gambar 1. 2 Tangkapan Layar Data Terinput di Tahun 2018

(Sumber: Website Data Pokok Kebudayaan. Kementerian Pendidikan.)

Dari penjelasan sebelumnya, sistem adalah struktur terorganisir yang membentuk kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Data Pokok Kebudayaan adalah sistem basis data yang menyimpan, mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengorganisir data sesuai dengan 5 kategori kebudayaan. Pengguna (*user*) menjalankan atau mengoperasikan sistem ini agar dapat berjalan dan mencapai tujuan. Pengguna (*user*) adalah sumber daya manusia yang mempengaruhi hasil implementasi sistem tersebut..

Dalam mengukur pemahaman pelaksana dan implementasi, penulis menggunakan metode HOT-Fit. Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa indikator manusia, organisasi, teknologi, dan manfaat saling berhubungan.

Berdasarkan hasil data ODCB dari sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi pada tahun 2018-2024 yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa hipotesis dapat dirumuskan. Hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pengguna (*user*) Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi (tinggi, sedang, atau rendah) dan kualitas implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi (baik, cukup baik, atau buruk)..

Hipotesis merupakan jawaban awal terhadap pertanyaan dalam penelitian. Jawaban ini disebut sementara karena hanya berdasarkan teori yang relevan dan belum didukung oleh data empiris yang dikumpulkan. Hipotesis dapat memiliki berbagai bentuk dan disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Selanjutnya, terdapat dua macam rumusan hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0), yakni ketika peneliti/penulis belum yakin dengan teori yang digunakan dan

hipotesis alternatif (H1), yaitu ketika penulis/peneliti telah yakin dengan kebenaran dari teori yang digunakan (Sugiyono, 2023a, 2023b).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis dapat merumuskan hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif, sebagai berikut:

- a. H0: Pemahaman pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan pada substansi cagar budaya di Provinsi Jambi masuk dalam kategori rendah.
- b. H1: Pemahaman pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan pada substansi cagar budaya di Provinsi Jambi masuk dalam kategori sedang.
- c. H0: Implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan pada substansi cagar budaya di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik
- d. H1: Implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan pada substansi cagar budaya di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori cukup baik.
- e. H0: Tidak terdapat hubungan antara pemahaman pengguna sistem Data Pokok Kebudayaan terhadap manfaat yang dirasakan pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi.
- f. H1: Terdapat hubungan antara pemahaman pengguna sistem Data Pokok Kebudayaan terhadap manfaat yang dirasakan pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi.

- g. H0: Tidak terdapat hubungan antara implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan terhadap manfaat yang dirasakan pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi.
- h. H1: Terdapat hubungan antara implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan terhadap manfaat yang dirasakan pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi

1.8 METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan data berbentuk angka yang dianalisis secara statistik, sehingga pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi atau sampel tertentu diteliti, data dikumpulkan melalui instrumen penelitian, dan kemudian dianalisis secara kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2023b).

Penelitian ini dilakukan secara deduktif, artinya didasarkan pada teori atau gagasan umum yang sudah ada dan diterapkan pada fenomena tertentu berdasarkan data yang tersedia. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan beberapa hipotesis yang kemudian dianalisis dan diuji untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak (Abdullah dkk., 2022).

1.8.1 Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan, dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui Kantor Dinas Kebudayaan yang terdapat di Provinsi Jambi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari penelitian sebelumnya atau yang telah diteliti oleh orang lain, termasuk laporan, artikel, buku-

buku terkait sistem, manajemen sumber daya arkeologi, Sistem Data Pokok Kebudayaan, basis data, dan evaluasi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1.1 Data Primer

Data primer pada penelitian ini ialah data internal yang diperoleh dari 12 Kantor Dinas Bagian Kebudayaan di Provinsi Jambi, selaku pengguna dan penginput data kebudayaan khususnya data objek diduga cagar budaya ke dalam Sistem Data Pokok Kebudayaan.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner (angket) dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada sejumlah populasi maupun sampel, kemudian menghitung hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut (Sugiyono, 2023a). Pertanyaan/ Pernyataan yang diberikan memuat isi tentang profil pengguna, pemahaman pengguna, dan implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan di 12 instansi yang dituju, agar dapat menjawab masalah penelitian.

Kuesioner yang disebar disusun berdasarkan Buku Panduan sistem Data Pokok Kebudayaan dengan kisi-kisi menggunakan model HOT-Fit. Sebelum disebar, kuesioner ini telah melewati proses validasi isi oleh Pembimbing 1 Skripsi, yakni Nugraha Mahanani, S.S., M.A., serta untuk mendapatkan hasil validasi yang lebih akurat dan dapat dibuktikan dengan angka, setelah mendapatkan seluruh jawaban dari 30 responden, dilakukan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas agar dapat dilihat bahwa kuesioner ini telah tepat mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian (pemahaman dan implementasi pelaksana sistem DAPOBUD).

Penyebaran kuesioner menandakan bahwa kegiatan evaluasi sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan evaluasi formatif yakni evaluasi yang dilakukan ketika sistem yang dievaluasi masih berjalan. Kemudian, data yang diperoleh akan dihitung dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.1.2 Data Sekunder

Informasi dikumpulkan dari referensi yang tidak langsung diakses oleh peneliti, seperti laporan dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data awal dilakukan melalui studi literatur dengan membaca bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu pemahaman pengguna (user) dan penerapan sistem. Sumber-sumber ini terdiri dari kumpulan artikel, buku, laporan, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dari sumber-sumber tersebut, teori-teori pendukung, acuan penyusunan hipotesis dan instrumen penelitian, serta cara menganalisis data dapat diperoleh.

1.8.3 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah pertama adalah melakukan pengkodean data. Proses ini menjelaskan bagaimana jawaban dari pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner yang disebar diubah menjadi angka agar dapat dihitung. Setelah itu, data diklasifikasikan sesuai dengan variabel penelitian. Penelitian ini memiliki tiga variabel, yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen, atau variabel bebas, adalah penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen. Variabel dependen, atau variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau merupakan akibat dari variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemahaman pelaksana sistem Data Pokok

Kebudayaan dengan kode X1 dan implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan dengan kode X2. Sementara itu, variabel dependen adalah manfaat bersih (net benefit) pelaksana sistem Data Pokok Kebudayaan dengan kode Y.

Kedua, data-data yang telah diklasifikasikan selanjutnya disimpan menggunakan alat bantu berupa excel, lalu di olah menggunakan aplikasi SPSS untuk dapat mempermudah melakukan perhitungan. Lalu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrument penelitian agar data yang dihasilkan dapat terbukti bahwa instrumen tersebut telah tepat untuk mengukur apa yang akan diukur.

1.8.4 Analisis

1.8.4.1 Analisis Deskriptif Data Responden

Proses analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden yang mengisi kuesioner, seperti **instansi, jenis kelamin, usia, dan peran pengguna** di sistem Data Pokok Kebudayaan. Analisis ini memastikan bahwa responden sesuai sebagai pemberi data, dan data yang dikumpulkan siap digunakan untuk perhitungan berikutnya..

1.8.4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Setelah semua data dari responden, narasumber, atau sumber data lain terkumpul, kegiatan analisis dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. (Sugiyono, 2007, 2023a, 2023b). Penghitungan data dilakukan dengan menggunakan **mean, modus, median, standar deviasi, dan persentase**.

Data disajikan dalam bentuk tabel. Data ini membantu penulis dalam memahami kecenderungan data, bagaimana data terdistribusi, dan nilai yang sering

muncul dalam data. Dengan mengetahui ini, maka penulis dapat melihat pola umum dari jawaban yang diberikan oleh 30 responden. Selain itu, penulis juga dapat melihat bagaimana sebaran data dari nilai rata-ratanya, ini membantu dalam memberikan informasi berupa variasi dan konsistensi dari data yang dihasilkan secara umum. Setelah mengetahui hal tersebut, maka dilanjutkan ke analisis berikutnya agar data yang disajikan dapat dijabarkan lebih mendetail terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

1.8.4.3 Analisis Deskriptif Data Penelitian

Memberikan gambaran umum tentang distribusi frekuensi responden berdasarkan jawaban mereka terhadap pertanyaan kuesioner ialah maksud dari analisis deskriptif data penelitian. Jika telah sampai pada tahap ini, maka telah terbukti dari segi karakteristik responden hingga jawaban yang diberikan sudah sesuai dan teruji valid dengan penelitian sehingga dapat dilakukan perhitungan.

Pada analisis ini, data dijelaskan berdasarkan **skala dan variabel secara keseluruhan**, lalu **dirinci lagi per indikator** untuk menghasilkan informasi yang lebih jelas. Skala yang digunakan dalam kuesioner ada dua, yaitu Skala Guttman dan Skala Likert. skala ini dijelaskan secara terpisah karena sifat dan nilai masing-masing berbeda. Kemudian, dijelaskan berdasarkan pertanyaan variabel pemahaman pelaksana (X1), variabel implementasi sistem (X2) dan variabel manfaat (Y). Setelah itu, dijelaskan kembali berdasarkan indikator dalam penyusunan kuesioner, yang meliputi manusia, organisasi, dan teknologi.

Susunan penjelasan analisisnya, yakni (**Variabel X1 untuk pertanyaan Skala Guttman**) dilanjutkan dengan (**Variabel X1 untuk Skala Likert → Indikator X1**

Manusia (*human*) → Indikator X1 Organisasi (*Orrganization*) → Indikator X1 Teknologi (*Technology*)).

Kemudian, (**Variabel X2 untuk Skala Likert → Indikator X1 Manusia (*human*) → Indikator X1 Organisasi (*Orrganization*) → Indikator X1 Teknologi (*Technology*)).** Diakhiri dengan (**Variabel Y manfaat sistem**). Penjabaran ini dilakukan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan rinci.

1.8.4.4 Analisis *Spearman Rank*

Analisis ini menggunakan data berskala ordinal tanpa menggunakan istilah variabel bebas atau variabel terikat dan termasuk dalam uji non-parametrik. Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel Pemahaman Pelaksana Sistem Data Pokok Kebudayaan (X1) dan variabel Implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan (X2) terhadap variabel Manfaat Sistem yang Dirasakan oleh Pelaksana (Y). Selain itu, uji ini digunakan untuk menjawab rumusan hipotesis yang diajukan terkait hubungan antar variabel-variabel tersebut.

1.8.5 Uji Hipotesis

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban hipotesis mana yang diterima. Dalam penelitian ini, semua data populasi dihitung, kemudian hasilnya dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan. Setelah hasilnya diketahui, barulah membuat keputusan hipotesis mana yang ditolak dan diterima.

Pada hipotesis hubungan, dalam menguji hipotesisnya menggunakan perhitungan korelasi *Spearman Rank*, perhitungan ini untuk melihat apakah ada atau tidaknya hubungan antara variabel Pemahaman Pelaksana Sistem Data Pokok

Kebudayaan (X1) dan variabel Implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan (X2) terhadap variabel Manfaat Sistem yang Dirasakan oleh Pelaksana (Y).

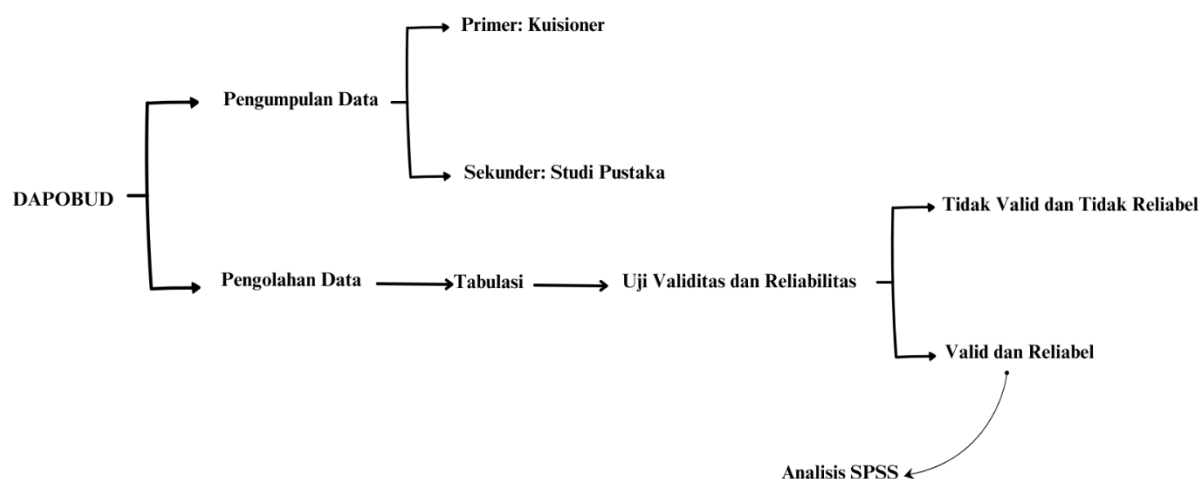
1.9 EKSPLANASI

Pada bagian ini, hasil perhitungan analisis statistik deskriptif menghasilkan informasi berupa angka. Angka-angka tersebut kemudian akan diuraikan secara deskriptif untuk menjelaskan rumusan masalah tentang tingkat pemahaman pengguna dan implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi, serta menguraikan hasil dari jawaban hipotesis.

1.10 PENARIKAN KESIMPULAN

Penarikan Kesimpulan adalah tahap terakhir dari penelitian ini. Tahap ini meliputi hasil analisis dari perhitungan yang telah dilakukan mengenai tingkat pemahaman pengguna sistem Data Pokok Kebudayaan dan seberapa baik implementasi sistem Data Pokok Kebudayaan di Provinsi Jambi.

1.11 ALUR PENELITIAN



Gambar 1. 3 Alur Penelitian